

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam tulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 4.1.1 Tahapan Jaringan Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang

Tahapan jaringan aktor yang terdiri dari 9 (sembilan) tahapan yaitu *Punctualization*, *Translation*, *Problematization*, *Interessement*, *Enrollment*, *Inscription*, *Speaker/Delegate Representative*, *Betrayal*, *Irreversibility*. Dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo jaringan yang terbentuk dapat dilihat melalui setiap tahapan yang telah dilakukan.

Identifikasi aktor (*Punctualization*) menentukan aktor utama dan aktor pendukung serta kepentingan setiap aktor di dalamnya. Aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Disporapar Jawa Tengah, Kelurahan Wonolopo, Pokdarwis Manggar Selaras, KKN Universitas Semarang, Pendopo Kinanthi, Karang Taruna Wonolopo, dan Jurnalis Jawa Pos Semarang. Dari beberapa aktor tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai aktor utama karena memiliki kepentingan melaksanakan SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 pada Desa Wisata Wonolopo.

Penyamaan tujuan masing-masing aktor (*Translation*) dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo terlihat dari kesamaan tujuan pemerintah, masyarakat, universitas, media massa yaitu menyejahterakan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki desa wisata. Tetapi dalam penerapannya masih terdapat perbedaan pandangan antara salah satu

pemilik wisata dan pokdarwis karena keinginan yang berbeda antar keduanya, sehingga keinginan salah satu aktor tidak dapat disatukan.

Perumusan masalah dan pendefinisian peran (*Problematization*) di Desa Wisata Wonolopo didapatkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat umum, sehingga dampak desa wisata hanya dirasakan sebagai masyarakat. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran masing-masing sesuai kemampuan dan aturan yang diterapkan. Disbudpar Kota Semarang memiliki peran fasilitator; Disporapar Jawa Tengah sebagai regulator atau *policy creator*; Pokdarwis Manggar Selaras dan Pendopo Kinanthi sebagai implementor; Kelurahan Wonolopo, KKN USM, Karang Taruna, dan Media Jawa Pos Semarang sebagai akselerator.

Tindakan yang dimunculkan Disbudpar Kota Semarang sebagai aktor utama (*Interessement*) dalam bentuk pelatihan, pembinaan pokdarwis, pendampingan pembaruan SK, pengawasan pengelolaan desa wisata, dan membentuk FKD tingkat kota. Tetapi Pokdarwis Manggar Selaras tidak mampu mengikuti tindakan Disbudpar Kota Semarang khususnya dalam pembaruan SK karena menurut Pokdarwis kegiatan di desa wisata dapat terus berjalan tanpa adanya SK, tetapi menurut Disbudpar Kota Semarang kegiatan di Desa Wisata Wonolopo perlu memiliki payung hukum.

Setelah aktor utama memunculkan tindakan, tahap selanjutnya yaitu menerima kepentingan masing-masing aktor serta mendelegasikan wewenang (*Enrollment*). Aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo saling mendelegasikan wewenang sesuai peran yang dimiliki. Disbudpar Kota Semarang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pendampingan. Disporapar Jawa Tengah memiliki wewenang dalam mengawasi kegiatan desa wisata dan membentuk regulasi. Sedangkan Kelurahan Wonolopo memiliki wewenang dalam memberikan perizinan administrasi pada kegiatan desa wisata. Meskipun wewenang telah didelegasikan, tetapi manfaat desa wisata hanya dirasakan oleh

masyarakat yang aktif terlibat dalam Desa Wisata Wonolopo baik sebagai pemilik wisata maupun pelaku UMKM. Sehingga dampak adanya Desa Wisata Wonolopo tidak merata karena kurangnya keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Penciptaan perjanjian baik lisan maupun tertulis (*Inscription*) untuk mengatur tindakan setiap aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo dalam bentuk tulisan yaitu SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012. Tetapi perjanjian-perjanjian lain seperti MOU atau bantuan dana tidak terbentuk. Sedangkan perjanjian lisan terbentuk melalui keikutsertaan Pokdarwis Manggar Selaras dalam setiap pelatihan yang diberikan Disbudpar Kota Semarang. Perjanjian lisan juga terbentuk melalui kerjasama antara Pokdarwis Manggar Selaras dengan pemilik wisata dan pelaku UMKM di Desa Wisata Wonolopo.

Aktor yang menjadi juru bicara (*Speaker/delegate representative*) ditentukan sesuai pertemuan yang dihadiri. Dalam pertemuan yang membahas kondisi Desa Wisata Wonolopo maka Pokdarwis Manggar Selaras sebagai perwakilan. Sedangkan ketika pertemuan berkaitan dengan pembinaan dan pelatihan maka Disbudpar Kota Semarang atau Disporapar Jawa Tengah mendatangkan narasumber sebagai juru bicara.

Penyelewengan perjanjian yang telah disepakati (*Betrayal*) dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo tidak terjadi. Tetapi salah satu aktor yang bekerjasama dengan Pokdarwis Manggar Selaras tidak sesuai dengan tujuan Desa Wisata Wonolopo yaitu mengutamakan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat.

Jaringan yang mengalami krisis dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo dapat disatukan kembali melalui langkah alternatif (*Irreversibility*) oleh setiap aktor. Langkah alternatif untuk mengembalikan krisis dalam jaringan Desa Wisata Wonolopo menurut Disporapar Jawa Tengah yaitu perlu menyusun master plan yang melibatkan seluruh potensi wisata, menyusun rencana aksi, siapa berbuat apa, menciptakan inovasi. Sedangkan menurut

Pendopo Kinanthi memerlukan reorganisasi, merangkul birokrasi, mencari tokoh yang dapat menyatukan kedua pokdarwis, serta menumbuhkan niat dan konsistensi masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo belum berjalan optimal karena beberapa tahapan yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan, tindakan yang dimunculkan aktor utama, serta penerimaan kepentingan dan pendelegasian wewenang masih mengalami hambatan.

#### **4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Pengembangan Desa Wisata Wonolopo yang melibatkan banyak aktor di dalamnya memiliki faktor yang mendukung serta menghambat di setiap keberjalanannya. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo yaitu:

1. Adanya kesamaan nilai setiap aktor yang terlibat untuk menyejahterakan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai pemberdayaan
2. Adanya pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali melalui Forum Komunikasi Desa Wisata (FKD).
3. Terjalannya komunikasi yang intens melalui platform *whatsapp*. Sehingga memudahkan dalam mengikuti kegiatan di desa wisata.
4. Keterbukaan informasi yang diberikan setiap aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo memicu timbulnya rasa saling percaya, sehingga kesalahpahaman mampu diminimalisir.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo adalah sebagai berikut:

1. Tidak terintegrasinya potensi wisata karena terjadi pembagian potensi yang dikelola oleh pokdarwis.
2. Perbedaan pandangan antara Pokdarwis Manggar Selaras dan Pendopo Kinanthi dalam mendefinisikan kekuatan utama dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo.
3. Partisipasi masyarakat yang kurang dan tidak konsisten menyebabkan perkembangan Desa Wisata Wonolopo masih stagnan.
4. Perspektif Pokdarwis Manggar Selaras dan Pendopo Kinanthi yang tidak menganggap pembaruan SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 sebagai hal yang penting karena memiliki banyak persyaratan di dalamnya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang dilakukan di lapangan, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergitas antara kedua pokdarwis dalam Desa Wisata Wonolopo agar seluruh potensi yang dimiliki dapat tersentuh dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas kedua pokdarwis dapat disatukan melalui mediasi dengan tokoh yang dapat menyatukan keinginan kedua pokdarwis.
2. Pokdarwis Manggar Selaras dengan pemilik wisata seperti Pendopo Kinanthi perlu berkoordinasi lebih lanjut untuk menyelaraskan keinginan dan kepentingan dengan berlandaskan kepentingan bersama. Komunikasi perlu terjalin antar keduanya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu kegiatan wisata di Desa Wisata Wonolopo.

3. Masyarakat perlu terlibat secara masif dan aktif untuk mengembangkan Desa Wisata Wonolopo. Keterlibatan anak muda dalam pengembangan desa wisata perlu ditambahkan agar desa wisata berkembang secara dinamis dan mengikuti zaman.
4. Pokdarwis Manggar Selaras harus mengikuti arahan Disbudpar Kota Semarang untuk segera melakukan pembaruan SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 yang telah kadaluwarsa agar kegiatan di Desa Wisata Wonolopo memiliki payung hukum dan melindungi keberjalanan Desa Wisata Wonolopo di masa depan.